

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Unilever Indonesia, Tbk

JMSAB
421

Agustin Adi Yuliyanti, Sri Dwi Estiningrum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

Research Paper

Financial Management

Abstract

This research aims to determine the factors that can affect the value added tax such as inflation, interest rates, and the value of exports at PT. Unilever Indonesia, Tbk. Research with a quantitative approach with secondary data types, namely periodic data (time series). The population of this research is the company's financial statements PT. Unilever Indonesia, Tbk for the period of the quarter or quarter in the period 2006-2020 or 15 years with a sample of 60 data. Furthermore, the data were analyzed using multiple linear regression assisted by SPSS Version 26 program. The results showed that interest rates and export values had no effect on value added tax, while inflation had a significant effect on value added tax. Even though inflation can increase VAT through selling prices, but inflation that is too high can reduce people's purchasing power so that company sales will decrease, thus this can indicate to PT Unilever Indonesia, Tbk and also other companies that there is a need for detailed supervision of the supply chain. When inflation occurs, the company is advised to continue to produce in the amount it should and the sales chain such as distributors and retailers to continue to distribute normally, this aims to avoid product shortages and continue to increase inflation. In addition, the government is required to manage inflation effectively and efficiently so that the production strategy is not disrupted by price increases.

Received: 23 Apr 2021

Accepted: 16 Jul 2021

Online: 02 Sep 2021

Keywords:

Inflation, Interest Rate, Export Value, Value Added Tax



Corresponding Author:

Agustin Adi Yuliyanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Email: agustinadiyuliyanti@gmail.com

© The Author(s) 2021

DOI: <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.339>

Jurnal Manajemen Strategi

dan Aplikasi Bisnis,

Vol 4, No. 2, 2021,

pp. 421 - 428

eISSN 2655-237X



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Setiap negara didunia menginginkan adanya perkembangan kemajuan baik dari sektor pembangunan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya dari yang sebelumnya telah ada. Tidak terkecuali dengan negara Indonesia, proses pembangunan nasional yang secara konstan dan berkesinambungan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidup dan mudah dalam memperoleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sehingga untuk merealisasikan hal tersebut negara membutuhkan biaya yang diperoleh dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Selain pemanfaatan sumber daya alam, sumber terbesar lain pendapatan negara diperoleh dari pajak, baik itu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan yang lainnya. Pengertian pajak adalah pungutan atas setiap warga negara yang bersifat wajib dibayarkan menurut peraturan perpajakan serta tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan serta berfungsi untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pada kehidupan sehari-hari pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai masyarakat diperoleh atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Meskipun pengenaan PPN dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/ atau distribusi barang atau jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir (Sukardji, 2014 dalam Nur Fitri, Zakaria, dan Arfah, 2020). Berikut ini merupakan data realisasi jumlah pendapatan negara yang bersumber dari pajak pertambahan nilai selama tahun 2007 hingga 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Realisasi Pendapatan Negara Dari PPN Periode 2007 Hingga 2020

No.	Tahun	PPN (Milyar Rupiah)
1	2007	154,527.00
2	2008	209,647.00
3	2009	193,067.00
4	2010	230,605.00
5	2011	277,800.00
6	2012	337,584.60
7	2013	384,713.50
8	2014	409,181.60
9	2015	423,710.82
10	2016	412,213.50
11	2017	480,724.60
12	2018	537,267.90
13	2019	592,790.00
14	2020	685,874.60

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pada table 1 diatas, menginformasikan bahwa data realisasi pendapatan negara yang bersumber dari pajak pertambahan nilai tahun 2007 sampai 2010 mengalami kenaikan dan penurunan, sementara pada tahun 2016 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, dan ditahun 2010 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Peningkatan PPN terhadap pendapatan negara masih belum menjamin tercukupinya APBN, jika terjadi suatu masalah pada suatu negara serta tanpa adanya prediksi terlebih dahulu seperti wabah covid 19, maka

penggunaan APBN akan menjadi meningkat untuk menanggulangi masalah tersebut. Sehingga mampu memicu terjadinya inflasi secara signifikan. Selain menerima PPN atas konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat, negara juga memperoleh PPN dari perusahaan pada setiap tingkatan produksi dan/ atau distribusi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Riset ini menggunakan salah satu perusahaan penyumbang PPN terbesar di Indonesia yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk, hal ini didukung oleh tingginya konsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terhadap berbagai macam produk yang dihasilkan dari PT. Unilever Indonesia Tbk seperti produk kebersihan, kecantikan, makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Selain itu dibuktikan dengan data pajak pertambahan nilai PT. Unilever Indonesia Tbk yang disetor setiap tahunnya ke negara yang disajikan pada table 2. dibawah:

Tabel 2.

Data Realisasi Pendapatan PT. Unilever Indonesia Tbk Dari PPN Tahun 2006-2020

No	Tahun	PPN (Milyar Rupiah)
1	2006	64.48
2	2007	45.53
3	2008	52.28
4	2009	185.17
5	2010	40.62
6	2011	163.01
7	2012	167.01
8	2013	119.77
9	2014	87.74
10	2015	197.18
11	2016	579.73
12	2017	58.51
13	2018	28.77
14	2019	92.15
15	2020	88.37

Sumber : Unilever, 2021

Setiap tahunnya PT. Unilever Indonesia Tbk menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN perusahaan, dan pada table 2. diatas, jumlah yang disetorkan tidak selalu sama adakalanya meningkat atau menurun. Peningkatan dan penurunan pajak pertambahan nilai tentunya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi negara tiap kuartal tahun, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, pendapatan nasional, deflasi, inflasi, suku bunga yang meningkat/menurun, barang yang di ekspor, dan lain sebagainya. Menurut (Masyitah, 2019; dan Junianto et al., 2020) faktor yang dapat mempengaruhi pajak pertambahan nilai adalah nilai ekspor, sedangkan Inflasi, dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, hasil ini tidak sejalan dengan (Yuliana, et al., 2017; dan Renata et al., 2016), menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Penelitian ini didasari oleh masih adanya *research gap* sehingga masih memerlukan penelitian lebih lanjut, selain itu untuk menemukan bukti empiris yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi PPN. Pada riset ini digunakan variabel inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai ekspor sebagai bahan pengujian terhadap faktor-faktor yang mampu mempengaruhi PPN pada PT. Unilever Indonesia Tbk.

KAJIAN PUSTAKA

Hakikatnya pajak merupakan pungutan wajib terhadap masyarakat yang manfaatnya tidak secara langsung dirasakan saat terjadinya pemungutan pajak (Sukardji, 2014), namun dapat dirasakan utilitasnya oleh masyarakat dalam pembiayaan yang berhubungan dengan pembangunan negara seperti infrastruktur, pendidikan, transportasi, dan pembangunan lainnya. Pada kehidupan sehari-hari pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai masyarakat diperoleh atas barang dan jasa yang dikonsumsi (Pohan, 2016). Meskipun pengenaan PPN dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/ atau distribusi barang atau jasa, namun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir (Sukardji, 2014 dalam Nur Fitri, Zakaria, dan Arfah, 2020).

Hubungan Inflasi dan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan pajak dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Menurut Sukirno yang dikutip dari (Sinambela & Rahmawati, 2019) tingkat inflasi merupakan persentase kenaikan harga suatu barang pada suatu periode tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Peningkatan inflasi mampu memicu penurunan pada permintaan barang, sehingga sejalan dengan perusahaan yang akan turut mengurangi jumlah produksinya dengan mengurangi jumlah penawaran barangnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pada pendapatan perusahaan, selain itu berdampak pada pendapatan masyarakat terkait faktor penurunan penggunaan tenaga kerja manusia. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan penurunan pendapatan baik perusahaan maupun masyarakat, lalu mengakibatkan penerimaan pajak akan menjadi berkurang (Kementerian Keuangan, 2013 dalam Fitri, Zakaria, dan Aryati, 2020). Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut H1: Inflasi berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hubungan Tingkat Suku Bunga dan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Boediono dalam penelitian (Junianto et al., 2020) suku bunga adalah harga pemakaian dana dari investasi yang digunakan sebagai indikator penentuan dalam melakukan pinjaman atau menyimpan sejumlah uang. Tingkat suku bunga mampu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan individu, dalam memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan atau membelanjakan uang dalam jumlah besar untuk kegiatan konsumsi sehari-hari. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menarik minat masyarakat untuk menabung daripada berinvestasi, namun sebaliknya tingkat suku bunga yang rendah akan mendorong minat masyarakat untuk melakukan pinjaman kepada bank baik untuk membuka usaha baru atau kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai atas produk yang dihasilkan atau bahan baku yang digunakan. Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut H2: Suku Bunga berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hubungan Nilai Ekspor dan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Priadi yang dikutip dari (Masyitah, 2019), ekspor adalah penjualan barang atau jasa di daerah pabean atau mengeluarkan barang atau jasa dari negara asal kepada negara lain pada suatu tahun tertentu. Nilai ekspor pada perusahaan mampu mempengaruhi harga barang dan upah, sedangkan nilai ekspor yang tidak dikonsumsi di daerah pabean akan dikenakan tarif 0%. Adanya ekspor atau menjual barang ke luar negeri dapat memberikan keuntungan untuk menambah devisa negara selain itu mampu meningkatkan PPN yang disetorkan perusahaan kepada negara. Hal ini terkait pengenaan PPN pada perusahaan dilakukan terhadap nilai tambah

yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/ atau distribusi barang atau jasa, meskipun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir akhir (Sukardji, 2014 dalam Nur Fitri, Zakaria, dan Arfah, 2020). Namun apabila nilai ekspor berkurang maka pajak pertambahan nilai yang akan disetor perusahaan kepada negara juga akan mengalami penurunan. Sehingga hipotesis yang diajukan sebagai berikut H3: Nilai Ekspor berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

METODE

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yaitu data periodik (time series). Selain itu riset ini adalah model prediksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi pajak pertambahan nilai perusahaan dengan menggunakan variabel inflasi, suku bunga dan nilai ekspor pada variabel independennya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan PT. Unilever Indonesia, Tbk untuk periode kuartal atau triwulan pada periode 2006-2020 atau selama 15 tahun dengan sampel sebanyak 60 data. Selanjutnya data dianalisis menggunakan regresi linier berganda berbantuan program SPSS Versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji asumsi klasik diketahui bahwa data bebas dari multikolinearitas, bebas heteroskedastisitas, bebas autokorelasi dan data terdistribusi normal. Kemudian dilakukan analisis deskriptif masing-masing variabel pada Tabel 1.

Analisis Deskriptif

Berdasarkan data yang telah diolah peneliti dengan menggunakan 60 sampel yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk dapat ditunjukkan pada table 3. dibawah bahwa nilai rata-rata dari variable Inflasi selama periode 2006-2020 adalah 5.2667, nilai minimumnya sebesar 3.50 dan nilai maksimumnya adalah 8.00 dengan standar deviasinya sebesar 1.36378.

Tabel 3.

Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	60	3.50	8.00	5.2667	1.36378
Suku Bunga	60	2.70	14.50	7.4200	2.79266
Nilai Ekspor	60	110166	2453225	895295.05	630014.562
PPN	60	0	215283	32838.82	43781.320

Sumber Output SPSS 26.0, data sekunder yang diolah 2021

Selanjutnya variabel Suku Bunga memiliki nilai rata-rata 7.4200 selama periode 2006-2020 dengan standar deviasi 2.79266, dengan nilai minimum 2.70 dan maksimum sebesar 14.50. Kemudian variable Nilai Ekspor diketahui memperoleh nilai minimum 110166 dan nilai maksimumnya 2453225 serta nilai rata-rata sebesar 895295.05 dengan standar deviasinya 630014.562. Kemudian variable Pajak Pertambahan Nilai atau PPN mendapatkan nilai rata - rata sebesar 32838.82 menggunakan standar deviasinya 43781.320, dan nilai maksimumnya sebesar 215283 dengan nilai minimumnya lebih rendah daripada nilai rata - rata, yaitu 0.

Uji Kecocokan Model (Goodness of Fit)

Uji Koefisien Determinasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu menjabarkan variasi pada variabel dependen dengan baik. Besarnya nilai atau nominal koefisien

determinasi ini antara angka nol sampai satu. Berdasarkan hasil olah data pada table 4. dibawah, dapat ditunjukkan nilai dari koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah 0.115 atau 11.5% sedangkan 88.5% dapat dijelaskan dengan faktor lain

Tabel 2.

Hasil Regresi

	B	t	sig
(Constant)	18.860	4.054	.000
Inflasi	-3.621	-2.527	.016
Suku Bunga	1.073	1.288	.205
Nilai Ekspor	-0.353	-1314	.196
Adj. R Square	0.115		
F-Statistics	2.863		

Sumber: Output SPSS 26.0, data sekunder yang diolah 2021

Hal ini menunjukkan bahwa variable independent berupa Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Ekspor dapat menjabarkan dengan baik variasi pada variabel dependen Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya dilakukan uji F, dari hasil uji statistik yang dilakukan, dapat dilihat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $2.863 > 2.84$ dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$, variabel suku bunga dan nilai ekspor memiliki nilai signifikansi yang melebihi nilai 0.05 dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PPN sedangkan pada variabel inflasi memiliki nilai signifikansi kurang dari nilai 0.05 sehingga variabel inflasi dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai.

PEMBAHASAN

Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Inflasi berpegaruh negatif terhadap pajak pertambahan nilai sebesar -2.527, hal ini berarti apabila inflasi meningkat satu persen saja pertahun, maka akan mengurangi sumber penerimaan pajak pertambahan nilai atas PT. Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp 2.527.000,- rupiah. Sementara nilai signifikansi variabel inflasi menunjukkan < 0.05 sehingga dapat diartikan inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai. Dengan adanya kenaikan inflasi, konsumen akan mengurangi daya konsumsinya karena harga barang meningkat sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai akan tetap sama dan tidak terjadi kenaikan bahkan bisa jadi menurun.

Pengaruh Suku Bunga terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Tingkat suku bunga yang rendah akan mendorong minat masyarakat untuk melakukan pinjaman kepada bank baik untuk membuka usaha baru atau kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai atas produk yang dihasilkan atau bahan baku yang digunakan. Berdasarkan hasil pengujian, suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap pajak pertambahan nilai sebesar 1.288, hal ini berarti apabila suku bunga turun beberapa satuan maka akan menurunkan penerimaan pajak pertambahan nilai oleh PT. Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp 1.288.000,- kepada negara. Sementara nilai signifikansi variabel suku

bunga sebesar 0.205, secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai karena nilai signifikansi menunjukkan angka lebih dari 0.05. Dengan adanya suku bunga turun maka konsumen akan lebih memilih membeli barang kebutuhan yang diinginkan daripada menyimpan uangnya di bank, dengan demikian akan menambah jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai. Namun apabila suku bunga naik, konsumen akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank dengan demikian penerimaan pajak pertambahan nilai akan menurun karena peredaran jumlah uang juga akan berkurang.

Pengaruh Nilai Ekspor terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Apabila nilai ekspor berkurang maka pajak pertambahan nilai yang akan disetor perusahaan kepada negara juga akan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pengujian, Nilai Ekspor memiliki pengaruh negatif terhadap pajak pertambahan nilai sebesar -1.314, hal ini berarti apabila nilai ekspor naik maka akan mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai PT. Unilever Indonesia Tbk sebesar Rp 1.314.000,- rupiah kepada negara. Sementara nilai signifikansi variabel suku bunga sebesar 0.196, secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak pertambahan nilai karena nilai signifikansi menunjukkan angka lebih dari 0.05. Dengan adanya kenaikan ekspor maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan berkurang, hal ini dikarenakan pemerintah telah menetapkan bahwa untuk nilai ekspor yang tidak dikonsumsi di daerah pabean pajak pertambahan nilai dikenakan tarif sebesar 0%.

Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Ekspor berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pajak Pertambahan Nilai

Pengenaan PPN pada perusahaan dilakukan terhadap nilai tambah yang terjadi dalam setiap tingkatan produksi dan/ atau distribusi barang atau jasa, meskipun beban atas pajak ini secara tidak langsung ditanggung oleh konsumen akhir akhir (Sukardji, 2014 dalam Nur Fitri, Zakaria, dan Arfah, 2020). Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, variabel independen Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Ekspor mempengaruhi variabel dependen pajak pertambahan nilai pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Hal ini dibuktikan oleh t-hitung > t. tabel. Sedangkan secara uji determinasi diketahui bahwa nilai koefisien determinasi *adjusted R Square* sebesar 11.5% dengan artian bahwa variabel inflasi, suku bunga dan nilai ekspor memiliki hubungan dengan pajak pertambahan nilai sebesar 11.5% sedangkan 88.5% dapat dijelaskan dengan faktor lain

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Meskipun inflasi dapat meningkatkan PPN melalui harga jual, namun inflasi yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga penjualan perusahaan akan menurun, dengan demikian hal ini dapat mengindikasikan kepada PT Unilever Indonesia, Tbk bahwa perlu adanya pengawasan yang mendetail atas *supply chain*. Ketika terjadi inflasi, perusahaan disarankan untuk tetap memproduksi dalam jumlah yang seharusnya dan rantai penjualan seperti distributor dan pengecer untuk tetap mendistribusikan secara normal, hal ini bertujuan untuk menghindari kekurangan produk dan terus meningkatkan inflasi. Selain itu, pemerintah diharuskan untuk mengelola inflasi secara efektif dan efisien agar strategi produksi perusahaan tidak terganggu oleh kenaikan harga barang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait beberapa faktor dari ekonomi makro yang dapat berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu mendorong para peneliti selanjutnya untuk memperluas penelitian dengan menggunakan variabel ekonomi makro lainnya, seperti Pertumbuhan Ekonomi, *Money Supply*, dan juga Pendapatan Nasional.

Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Terdapat sejumlah keterbatasan dalam riset ini yaitu objek penelitian yang digunakan hanyalah laporan keuangan PT. Unilever Indonesia, Tbk periode 2006-2020 atau selama 15 tahun saja. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya tidak terbatas pada periode tersebut melainkan dapat menggunakan laporan keuangan PT Unilever Indonesia, Tbk pada periode lainnya. Selain itu tidak terbatas pada satu perusahaan saja, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan perusahaan pada sektor yang lainnya seperti sektor industri, property, keuangan, dan lain sebagainya, agar nantinya hasil penelitian dapat dijadikan sebagai generalisasi seluruh perusahaan. Sehingga akan diperoleh hasil pengujian yang lebih akurat terkait faktor-faktor yang mampu mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai.

REFERENSI

- Fitri, N., Zakaria, J., & Arfah, A. (2020). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Makassar. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 156-168.
- Junianto, S., Harimurti, F., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga Dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16, 311-321.
- Masyitah, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(2), 89-104.
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori Konsep, dan Aplikasi PPN*. PT. Gava medi. Yogyakarta.
- Puspitha, P. V., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak se-Bali). *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1530-1556.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 9(1).
- Sinambela, T., & Rahmawati, S. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Yuliana, D., Marhamah, M., & Sutrisno, S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Tahun 2014-2016 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Candisari Kota Semarang). *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 9(3), 97-113..

Competing Interests

The authors declare that they have no competing interests

Author Detail

Agustin Adi Yuliyanti. Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penulis dapat dihubungi melalui email agustinadiyuliyanti@gmail.com

Sri Dwi Estiningrum. Merupakan salah satu dosen prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan bidang kajian Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntansi Syariah.